

RENCANA KERJA (RENJA)

KANTOR CAMAT PRAYA TIMUR



TAHUN 2022

KATA PENGANTAR

Penyusunan rencana kinerja (Renja) merupakan sebuah kegiatan perencanaan tahunan yang diharapkan mampu memberikan arah bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam melaksanakan kegiatan dalam kurun satu tahunan.

Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah tahun 2022 berpedoman pada arah kebijakan dan sasaran pokok RPJMD kabupaten LombokTengah 2011-2031 karena perencanaan tahun 2022 tahun teransisi dimana dokumen RPJMD dan Rencana Strategis OPD belum tersedia , untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah Terpilih, yang mewarnai Rencana Pembangunan Jangka menengah Derah Kabupaten Lombok Tengah .

Rencana kerja ini disusun sebagai salah satu ikhtiar dalam meningkatkan kinerja SKPD Kantor Camat Praya Timur dalam melaksanakan tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan serta pelayanan administrasi kepada masyarakat.

Akhirnya terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan sehingga Rencana kerja ini dapat diselesaikan pada waktunya meskipun tidak sempurna yang diharapkan.

Semoga bermanfaat bagi pelaksanaan tugas pengabdian kita kepada negara dan masyarakat. Amiin.

Mujur , Februari 2021

CAMAT PRAYA TIMUR,

H.LALU FATHURRAHMAN,SH.

NIP.: 196712311986021020

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	ii

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Landasan Hukum.....	2
1.3. Maksud dan Tujuan.....	3
1.4. Sistematika Penulisan.....	4-6

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU.....7-14

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun lalu dan Capaian

Renstra Perangkat Daerah

Pokok-pokok Materi yang disajikan, antara lain;

- a) Realisasi Program/Kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil yang direncanakan;
- b) Realisasi Program/Kegiatan yang memenuhi target kinerja hasil yang direncanakan;
- c) Realisasi Program/Kegiatan yang melebihi target kinerja hasil yang direncanakan;
- d) Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja Program/Kegiatan;
- e) Implikasi yang timbul terhadap target capaian Program Renstra Perangkat Daerah;
- f) Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

2.2. Analisa Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Pokok-pokok materi yang disajikan, antara lain ;

- a) Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Perangkat Daerah;
- b) Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan

- tugas dan fungsi Perangkat Daerah;
- c) Danpaknya terhadap pencapaian visi dan misi Kepala Daerah, terhadap capaian program Nasional/Internasional, seperti NSPK, SPM dan SDGs (Sustainable Development Goals);
 - d) Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Perangkat Daerah;
 - e) Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH.....15-18

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan Nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting Penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah.

3.3. Program dan Kegiatan

Pokok-pokok materi yang disajikan, antara lain :

- a) Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan.
- b) Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH19-25

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2021 dan Prakiraan Maju Tahun 2022

\

BAB V PENUTUP..... 26-23

- a) Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan.
- b) Kaidah - kaidah pelaksanaan
- c) Rencana tidak lanjut

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Renja SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk priode 1 (satu) tahun yang memuat Tujuan, Strategi, Kebijakan dan Program.

Fungsi Renja

- a) Memudahkan melakukan kontrol terhadap semua aktivitas baik yang sedang maupun yang akan datang.
- b) Dapat mengukur outcome(hasil) yang harus dicapai
- c) Dapat dijadikan sebagai sarana untuk meminimalisir resiko dan mengoptimalkan hasil yang akan dicapai dan sebagai alat untuk mengukur kemajuan pelaksanaan tugas
- d) Menjadi alat/ media untuk berkoordinasi dengan pihak lain.
- e) Mempermudah pencapain target, strategis dan penggunaan sumber daya.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional telah melahirkan paradigma baru yaitu sistem pemerintahan yang lebih desentralistik. Hal ini membawa implikasi dalam kegiatan perencanaan, dimana pemerintah daerah mempunyai tanggung jawab penuh dalam proses penyusunan, pelaksanaan dan pembiayaan pembangunannya. Disamping itu terjadi proses demokratisasi yang lebih nyata, yang ditandai dengan semakin luasnya ruang publik untuk berpartisipasi dalam menentukan kebijakan dan strategi pembangunan daerah.

Sejalan dengan perubahan-perubahan lingkungan strategis dalam tataran normatif dimana peran pemerintah daerah dan masyarakat semakin besar, terdapat tiga isu penting berkaitan dengan kegiatan perencanaan daerah, yaitu peningkatan kualitas proses dan hasil perencanaan, peningkatan kualitas dan hasil monitoring dan evaluasi, serta peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan.

Perencanaan Pembangunan Daerah merupakan suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat melalui urutan pilihan yang melibatkan berbagai unsur didalamnya dengan memanfaatkan dan mengalokasikan sumberdaya daerah yang tersedia dalam rangka meningkatkan kemajuan daerah serta kesejahteraan rakyat.

Oleh karena hasil perencanaan pembangunan erat kaitannya dengan penganggaran daerah, maka perencanaan mempunyai fungsi yang strategis dalam dinamika pembangunan daerah untuk mendayagunakan potensi dan sumber pembiayaan yang ada dan sangat terbatas.

Kantor Camat Praya Timur Kabupaten Lombok Tengah, adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang tugas pokoknya membantu Bupati dalam menyelenggarakan sebagian tugas pemerintahan umum, pembangunan dan tugas pembantuan serta pelayanan kepada masyarakat.

Untuk mendukung pelaksanaan tugas serta fungsi tersebut, maka Kantor Camat Praya Timur Kabupaten Lombok Tengah perlu menetapkan tujuan, sasaran, strategi dan program yang akan ditempuh untuk kelancaran dan keberhasilan pelaksanaan tugas dimaksud.

Strategi tersebut dijabarkan dalam berbagai kebijakan dan program yang mempertimbangkan pengaruh internal dan eksternal, baik yang menyangkut peluang, tantangan, kekuatan dan kelemahan yang ada. Keseluruhan pemikiran mengenai arah serta cara yang dipilih untuk mencapai tujuan dan sasaran pelaksanaan tugas Kantor Camat Praya Timur tersebut tertuang dalam dokumen Rencana Strategis Kantor Camat Praya Timur Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2017-2021.

1.2. Landasan Hukum

1. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286)
2. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421)
3. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438)

4. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244).
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah.
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementrian/Lembaga Pemerintah dan Pemerintah Daerah ;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Tata Cara Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Tengah Nomor 3 Tahun 2000 tentang Kewenangan Kabupaten Lombok Tengah Sebagai Daerah Otonom
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Tengah Nomor 11 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Lombok Tengah.
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok tengah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan jangka Panjang Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2011-2031
11. Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Lombok Tengah 2005 - 2010;
12. Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 90 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Kecamatan.
13. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor : 414.2/2435.SJ tanggal 21 September 2005 Tentang Pedoman Umum Pengelolaan Pembangunan Partisipatif
14. Keputusan Kepala Lembaga Adminitrasi Negera Tanggal 25 Maret 2003 Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

1.3. Maksud dan Tujuan

1. Maksud Penyusunan Renja
 - a. Memberikan arah dan pedoman bagi semua personil dalam melaksanakan tugasnya untuk menentukan prioritas-prioritas dibidang perencanaan pembangunan, sehingga tujuan program dan sasaran kegiatan yang telah ditetapkan dalam kurun waktu 1(satu) tahun dapat tercapai.
 - b. Mempermudah pengendalian kegiatan serta pelaksanaan koordinasi instansi terkait, monitoring, analisis, evaluasi kegiatan baik secara internal maupun eksternal.
 - c. Memberikan informasi kepada pemangku kepentingan (stakeholders) tentang rencana pembangunan tahunan.

- d. Menjadi kerangka dasar bagi Kantor Camat Praya Timur dalam upaya meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan.
2. Tujuan Penyusunan Renja
- a. Merumuskan gambaran umum kondisi pelayanan yang akan dilaksanakan oleh Kantor Camat Praya Timur sebagai penjabaran visi dan misi Kepala Daerah terpilih selama 1 (satu) tahun.
 - b. Merumuskan gambaran ketersediaan anggaran yang dapat dibelanjakan dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan disertai sasaran dan fokus program/kegiatan selama 1 (satu) tahun .
 - c. Menerjemahkan visi dan misi kepala daerah ke dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah selama 1 (satu) tahun sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD dengan berpedoman kepada Perda tentang RPJMD periode berkenaan.
 - d. Menetapkan berbagai program dan kegiatan prioritas yang disertai dengan indikasi pagu anggaran dan target indikator kinerja yang akan dilaksanakan selama priode RPJMD berkenaan.
 - e. Memudahkan para pemangku kepentingan (stakeholders) untuk menetapkan kebijakan.
 - f. Meningkatkan pelayanan masyarakat secara prima.

1.4. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.2. Maksud dan Tujuan
- 1.3. Sistematika Penulisan

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Pokok-pokok Materi yang disajikan, antara lain;

- a) Realisasi Program/Kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil yang direncanakan;
- b) Realisasi Program/Kegiatan yang memenuhi target kinerja hasil yang direncanakan;
- c) Realisasi Program/Kegiatan yang melebihi target kinerja hasil yang direncanakan;
- d) Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja Program/Kegiatan;

- e) Implikasi yang timbul terhadap target capaian Program Renstra Perangkat Daerah; dan
- f) Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

2.2 Analisa Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Pokok-pokok materi yang disajikan, antara lain ;

- a) Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Perangkat Daerah;
- b) Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah;
- c) Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi Kepala Daerah, terhadap capaian program Nasional/Internasional, seperti NSPK, SPM dan SDGs(Sustainable Development Goals);
- d) Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Perangkat Daerah; dan
- e) Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan Nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting Penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah.

3.3. Program dan Kegiatan

Pokok-pokok materi yang disajikan, antara lain :

- a) Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan.
- b) Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2021 dan Prakiraan Maju Tahun 2022

BAB V PENUTUP

- a) Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan.
- b) Kaidah - kaidah pelaksanaan
- c) Rencana tidak lanjut

BAB II

HASILN EVALUASI RENJA SKPD TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Program dan Kegiatan yang terselenggara dan terjabar pada DPA-SKPD Kecamatan Praya Timur Tahun 2020 adalah Program Peningkatan dan Pengembangan Pembangunan Kecamatan .

Hasil capaian dari program dan kegiatan pengembangan kapasitas wilayah kecamatan target anggaran sebesar Rp.794.862,800,- terrealisasi sebesar Rp. 782.306.630,- atau sebesar 98,42 %, dengan rincian sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1.1. Kegiatan penyediaan jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik

Untuk melaksanakan kegiatan penyediaan jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik disediakan anggaran sebesar

Rp.28.800.000 ,- dengan pencapaian indikator kinerja sebagai berikut :

Output : Penyediaan jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik

Outcome : Terbayarnya jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik

Realisasi : Keuangan sebesar Rp.19.631.280,- (98,16 %) ,
fisik 68 %

1.1. Kegiatan Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional.

Untuk melaksanakan kegiatan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional disediakan anggaran sebesar

Rp. 2.500.000,- dengan pencapaian indikator kinerja sebagai berikut :

Output : STNK Roda Dua dan STNK Roda empat 13 unit

Outcome : Melancarkan tugas- tugas pejabat eselon III dan IV

Realisasi : Keuangan sebesar Rp.1.427.420 ,- (57,10 %) ,
fisik 57 %

1.2. Kegiatan penyediaan jasa administrasi keuangan

Untuk melaksanakan kegiatan Laporan Keuangan bulanan dan tahunan SKPD disediakan anggaran sebesar

Rp.12.980.000 ,- dengan pencapaian indikator kinerja sebagai berikut :

Output : Laporan keuangan tahunan, laporan keuangan bulanan

Outcome : Terlaksananya pembayaran honorarium
Entry SPJ,pelaporan,bendahara pengeluaran,
pengurus barang, bendahara penerimaan,
PPK SKPD,SIRUP.

Realisasi : Keuangan sebesar Rp.12.980.000 ,- (100 %),
fisik 100 %

1.3. Kegiatan penyediaan alat tulis kantor

Untuk melaksanakan kegiatan Alat Tulis Kantor (ATK) disediakan anggaran sebesar

Rp. 22.000.000,- dengan pencapaian indikator kinerja sebagai berikut :

Output : Alat Tulis Kantor

Outcome : Terpenuhinya Alat tulis kantor

Realisasi : Keuangan sebesar Rp. 22.000.000,- (100 %),
fisik 100 %

1.4. Kegiatan penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

Untuk melaksanakan kegiatan penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor disediakan anggaran sebesar

Rp. 69.705.050,- dengan pencapaian indikator kinerja sebagai berikut :

Output : Alat-alat elektronik lainnya,alat-alat rumah tangga,komputer/laoptop/server dan perlengkapannya,meubelair

Outcome : Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor

Realisasi : Keuangan sebesar Rp. 69.705.000,- (100 %),
fisik 100 %

1.5. Kegiatan Penyediaan makanan dan minuman

Untuk melaksanakan kegiatan Penyediaan makanan dan minuman disediakan anggaran sebesar

Rp. 32.670.000,- dengan pencapaian indikator kinerja sebagai berikut :

Output : Makanan/ minuman

Outcome : Terpenuhinya makan minum rapat-rapat

Realisasi : Keuangan sebesar Rp. 32.670.000,- (100 %),
fisik 100 %

1.6. Kegiatan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

Untuk melaksanakan kegiatan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah disediakan anggaran sebesar

Rp. 8.500.000,- dengan pencapaian indikator kinerja sebagai berikut :

Output : Perjalanan dinas luar daerah

Outcome : Bertambahnya pengalaman pejabat eselon III dan IV

Realisasi : Keuangan sebesar Rp. 6.185.200,- (72,77 %),
fisik 100 %

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

2.1. Kegiatan pengadaan kendaraan dinas/operasional

Untuk melaksanakan kegiatan pengadaan kendaraan dinas/operasional disediakan anggaran sebesar

Rp. , - dengan pencapaian indikator kinerja sebagai berikut :

Output : Kendaraan dinas/operasional

Outcome : Lancarnya tugas-tugas pejabat eselon III dan IV

Realisasi : Keuangan sebesar Rp. , - (0 %),
fisik 0 %

2.2. Kegiatan pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

Untuk melaksanakan kegiatan pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional disediakan anggaran sebesar

Rp.6.500.000 , - dengan pencapaian indikator kinerja sebagai berikut :

Output : Jasa servis kendaraan dinas/operasional 13

Outcome : Kendaraan dinas kondisi baik

Realisasi : Keuangan sebesar Rp. 6.500.000 , - (100 %),
fisik 100 %

3. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

3.1. Kegiatan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar

realisasi kinerja SKPD

Untuk melaksanakan kegiatan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar

realisasi kinerja SKPD disediakan anggaran sebesar Rp.25.955.000 , - dengan

pencapaian indikator kinerja sebagai berikut :

Output : Penyusunan laporan capaian kinerja

Outcome : Tersusunnya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja.

Realisasi : Keuangan sebesar Rp. 25.955.000 , - (100 %),
fisik 100 %

4. Program Peningkatan dan Pengembangan Pembangunan Kecamatan

4.1. Kegiatan pengembangan kapasitas wilayah kecamatan

Untuk melaksanakan kegiatan pengembangan kapasitas wilayah kecamatan disediakan anggaran sebesar Rp.297.175.250 , - dengan pencapaian indikator kinerja

sebagai berikut :

Output : Pengembangan kapasitas wilayah kecamatan

Outcome : Laporan intensifikasi dan ekstensifikasi PBB,

profil kecamatan, laporan hasil koordinasi pemerintahan umum.

Realisasi : Keuangan sebesar Rp. 297.175.250 ,- (100 %) ,
fisik 100 %

4.2. Kegiatan Penyelenggaraan administrasi kesejahteraan rakyat

Untuk melaksanakan kegiatan Penyelenggaraan administrasi kesejahteraan rakyat disediakan anggaran sebesar Rp.227.077.500 ,- dengan pencapaian indikator kinerja sebagai berikut :

Output : Penyelenggaraan administrasi kesejahteraan rakyat

Outcome : Terlaksananya tablik akbar ramadhan, laporan pelaksanaan MTQ/STQ tingkat kecamatan, dll.

Realisasi : Keuangan sebesar Rp. 227.077.500 ,- (100 %) ,
fisik 100 %

4.3. Kegiatan Penyelenggaraan administrasi pelayanan umum

Untuk melaksanakan kegiatan Penyelenggaraan administrasi pelayanan umum disediakan anggaran sebesar Rp.5.500.000 ,- dengan pencapaian indikator kinerja sebagai berikut :

Output : Penyelenggaraan administrasi pelayanan umum rakyat

Outcome : Terkelolanya pasar kecamatan ,
laporan penyelenggaraan PATEN/IUMK.

Realisasi : Keuangan sebesar Rp. 5.500.000 ,- (100 %) ,
fisik 100 %

4.4. Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Wilayah kecamatan

Untuk melaksanakan kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Wilayah kecamatan disediakan anggaran sebesar Rp.41.800.000 ,- dengan pencapaian indikator kinerja sebagai berikut :

Output : Pemberdayaan masyarakat wilayah kecamatan

Outcome : Laporan hasil evaluasi LPPDes, Laporan hasil evaluasi tingkat perkembangan desa/kelurahan,
Laporan hasil evaluasi APBDes.

Realisasi : Keuangan sebesar Rp. 41.800.000 ,- (100 %) ,
fisik 100 %

4.5. Kegiatan Musyawarah perencanaan pemangunan (Musrenbang) kecamatan

Untuk melaksanakan kegiatan Musyawarah perencanaan pemangunan (Musrenbang) kecamatan disediakan anggaran sebesar Rp.13.700.000 ,- dengan pencapaian indikator kinerja sebagai berikut :

Output : Musyawarah perencanaan pemangunan (Musrenbang) kecamatan
Outcome : Laporan hasil musrenbang kecamatan.
Realisasi : Keuangan sebesar Rp. 13.700.000 ,- (100 %) ,
fisik 100 %

Pokok-pokok Materi yang disajikan, antara lain;

a) Realisasi Program/Kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil yang direncanakan;

1. ***Belanja penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik***
Rp. 9.168.740,-
2. ***Belanja jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan***
Rp. 1.072.580,-
3. ***Belanja rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah***
Rp. 2.314.800,-

b) Realisasi Program/Kegiatan yang memenuhi target kinerja hasil yang direncanakan;

b.1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

- Penyediaan Jasa administrasi keuangan
- Penyediaan Alat Tulis Kantor
- Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
- Penyediaan Makanan dan minuman

b.2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

- Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

b.3. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja

- Penyusunan Laporan capaian kinerja dan ikhtisar realidasi kinerja SKPD

b.4. Program Peningkatan dan Pengembangan Pembangunan Kecamatan

- Pengembangan Kapasitas Wilayah Kecamatan
- Penyelenggaraan Administrasi Kesejahteraan Rakyat Kecamatan
- Pemberdayaan Masyarakat Wilayah Kecamatan
- Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kecamatan

- Penyelenggaraan Administrasi Pelayanan Umum

- c) Realisasi Program/Kegiatan yang melebihi target kinerja hasil yang direncanakan;

Tidak Ada

- d) Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja Program/Kegiatan;

1. ***Karena tingginya pagu anggaran untuk air dan listrik***
2. **Karenan tidak ada kendaraan roda empat**
3. **Karenan tidak mencukupi dana yang ada untuk perjanjian dinas berikutnya**

- e) Implikasi yang timbul terhadap target capaian Program Renstra Perangkat Daerah;

Implikasinya terhadap pelayanan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Praya Timur sebagai berikut :

1. Membangun sistem pelayanan berkualitas yang murah, aman, cepat, efisien dan transparan;
2. Membangun komitmen aparatur untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya secara maksimal;
3. Meningkatkan komitmen aparatur dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat;
4. Menerapkan kebijakan pola kerja, pola pembinaan aparatur yang sesuai dengan potensi dan kondisi sebagai bahan masukan kepada pemerintah Kabupaten Lombok Tengah dalam menetapkan kebijakan strategis dengan memperhatikan kepentingan masyarakat.

- f) Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut;

- **Sebelum melakukan perencanaan dan penganggaran tahun berikutnya harus melihat perencanaan dan penganggaran tahun sebelumnya sebagai dasar penyusunan anggaran supaya tidak terjadi hambatan/penyebab tidak optimalnya capaian program..**

2.2 Analisa Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Tahun 2020

Untuk mencapai tujuan dan sasaran pelaksanaan tugas Kantor Camat Praya Timur perlu dibuat Indikator Kinerja Program (Outcome) dan kegiatan (Output), sebagai berikut :

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2020	Realisasi 2020	%	Realisasi Tahun sebelumnya	Target akhir	Sumber Data
----	-------------------	--------	-------------	----------------	---	----------------------------	--------------	-------------

						2018	2019	renstra	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Nilai SAKIP Kecamatan		CC	CC	CC	C	CC	B	Bagian APU
2	Indeks Kepuasan Layanan		85	85	85	75	85	88	
3	Nilai Kinerja Camat		200	200	190	165	200	220	Bagian APU
4	Prosentase layanan administrasi perkantoran	Persen	100	100	85,43	100	100	100	
	Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik	Megabyte, kwh, m3,expl	240, 12.000,12, 24	240	68,16	97	98	68,16	Hasil Laopran
	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan	Unit	13	13	57,10	81	91	57,10	Hasil Laopran
	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Dokumen	1	1	100	100	100	100	Hasil Laopran
	Penyediaan ATK	Bulan	12	12	100	100	100	100	Hasil Laopran
	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Paket	1	1	100	100	100	100	Hasil Laopran
	Penyediaan Makanan dan minuman	Bulan	12	12	100	100	100	100	Hasil Laopran
	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Dokumen	4	1	72,77	100	81	72,77	Hasil Laopran
5	Prosentase sarana prasarana kondisi baik	Persen	100	100	100	100	100	100	
	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Unit	13	13	100	100	100	100	Hasil Laopran
6	Prosentase dokumen laporan kinerja dilaksanakan tepat waktu	Persen	100	100	100	100	100	100	
	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Dokumen	15	15	100	100	100	100	Hasil Laopran
7	Rata-rata capaian kinerja pemerintahan kecamatan yang dikoordinasikan	Persen	100	100	100	100	100	100	
	Laporan intensifikasi dan ekstensifikasi PRB	Dokumen	1	1	100	100	100	100	Hasil Laopran

	Profil kecamatan	Dokume	1	1	100	100	100	100	Hasil Laopran
	Laopran hasil koordinasi pemerintahan	Dokumen	1	1	100	100	100	100	Hasil Laopran
	Tabliq akbar ramadhan	Kali	1	1	100	100	100	100	Hasil Laopran
	Laporan Pelaksanaan MTQ/STQ tingkat	Kali	1	1	100	100	100	100	Hasil Laporan
	Laporan lomba usaha kesehatan Sekelab (UKC)	Kali	1	0	0	100	100	100	Hasil Laopran
	Laporan pengelolaan pasar kecamatan	Dokumen	0	0	0	100	100	100	Bapenda
	Laporan penyelenggaraan PATEN/IUMK	Dokumen	1	1	100	100	100	100	Hasil laporan
	Laporan hasil evaluasi LPPDes	Dokumen	1	1	100	100	100	100	Hasil Laopran
	Laporan hasil evaluasi tingkat perkembangan desa/kelurahan	Dokumen	1	1	100	100	100	100	Hasil Laopran
	Laporan hasil evaluasi APBDes	Dokumen	1	1	100	100	100	100	Hasil Laopran
	Laporan hasil musrenbang kecamatan	Dokumen	1	1	100	100	100	100	Hasil Laopran
	RATA-RATA				96,36 %	KRITERIA tahun 20120: Sangat Baik			

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Secara umum, isu dan permasalahan yang dihadapi antara lain :

1. Tuntutan masyarakat untuk mendapatkan pelayanan prima;
2. Adanya tuntutan akuntabilitas tata kelola pemerintahan;
3. Perkembangan Iptek yang pesat yang tidak dibarengi dengan semangat SDM untuk meningkatkan kemampuannya;
4. Membangun komitmen aparatur untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya secara maksimal;

Pokok-pokok materi yang disajikan, antara lain ;

- a) Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Perangkat Daerah;
Tingkat kinerja pelayanan Perangkat Daerah telah menunjukkan tingkat kemajuan yang mengembirakan, hal ini ditunjukkan dengan capaian target kinerja pelayanan publik yang diperjanjikan . Keadaan ini sebagai pengaruh adanya perencanaan yang semakin baik pada sistem perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah.
- b) Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah Kantor Camat Praya Timur sebagai berikut;
 1. Kuantitas Sumber daya Manusia (SDM) yang ada di Kantor Camat Timur masih kurang, yang berdampak pada kurang maksimalnya pelayanan kepada masyarakat.
 2. Kurangnya pelatihan pegawai yang mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.
- c) Danpaknya terhadap pencapaian visi dan misi Kepala Daerah, terhadap capaian program Nasional/Internasional, seperti NSPK, SPM dan SDGs(Sustainable Development Goals) adalah;
Ketersediaan sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi serta ditunjang dengan sarana dan prasarana yang memadai, adanya manajemen kepegawaian yang baik, ketersediaan data yang valid dan akurat sehingga penyelenggaraan pemerintahan dapat terlaksana dengan baik.

- d) Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Perangkat Daerah adalah;
1. Terdapat ketidakseimbangan rasio antara beban kerja SKPD dengan jumlah sarana serta personil yang akan melaksanakan kegiatan pelayanan kepada masyarakat.
 2. Jumlah anggaran Kantor Camat Praya Timur sebagai sebuah SKPD masih kurang.
 3. Adanya kegiatan yang tidak tepat waktu.
 4. Adanya beberapa tugas tambahan yang tidak dapat diduga sebelumnya.
- e) Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan adalah sebagai berikut.
1. Perijinan;
 2. Rekomendasi;
 3. Koordinasi;
 4. Pembinaan;
 5. Pengawasan;
 6. Pasilitasi;
 7. Penetapan;
 8. Penyelenggaraan; dan

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan Nasional, yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah adalah pedoman yang wajib dipatuhi dalam melakukan tindakan untuk melaksanakan strategi yang dipilih, agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran.

Kebijakan yang telah ditetapkan Kantor Camat Praya Timur adalah :

- ***Koordinasi Kecamatan dengan stakeholder***
- ***Peningkatan layanan administrasi***
- ***Peningkatan kualitas layanan***
- ***Peningkatan Laporan Keuangan dan Kinerja kecamatan***

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Perumusan tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan ini diarahkan dalam upaya melaksanakan visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih, khususnya misi kelima, “ **Mewujudkan pemerintahan yang baik dan kepastian hukum dengan dukungan birokrasi yang memiliki pelayanan berkualitas** “.

a. Tujuan

Dalam rangka mendukung upaya meningkatkan kapasitas pemerintah dalam pelayanan publik, Kantor Camat Praya Timur, bertujuan :

- Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan kecamatan.

b. Sasaran

Sasaran yang ingin dicapai oleh Kantor Camat Praya Timur dalam mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas adalah :

- Meningkatnya kualitas layanan kecamatan

Pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Kantor Camat Praya Timur beserta indikator kerjanya disajikan sebagai berikut :

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJATAHUNAN				
				2016	2017	2018	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan kecamatan	Meningkatnya kualitas layanan kecamatan	Nilai SAKIP Kecamatan	C	C	CC	CC	B
			Indeks kepuasan layanan kecamatan	75	75	85	85	88
			Nilai Kinerja Camat	165	165	200	200	220
			Rata-rata capaian kinerja pemerintahan kecamatan yang dikoordinasikan	100	100	100	100	100

c. Strategi

Untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, Kantor Camat Praya Timur menetapkan strategi sebagai berikut :

- Meningkatkan kualitas manajemen Kecamatan

d. Kebijakan

Kebijakan adalah pedoman yang wajib dipatuhi dalam melakukan tindakan untuk melaksanakan strategi yang dipilih, agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran.

Kebijakan yang telah ditetapkan Kantor Camat Praya Timur adalah :

- Koordinasi Kecamatan dengan stakeholder
- Peningkatan layanan administrasi
- Peningkatan kualitas layanan
- Peningkatan Laporan Keuangan dan Kinerja kecamatan

3.3. Program dan Kegiatan

Pokok-pokok materi yang disajikan, antara lain :

a) Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan.

- Adanya kenaikan atau penurunan harga
- Perbedaan harga antara yang tertuang dalam DPA SKPD dengan harga real di pasaran

b) Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan

Rekapitulasi Program dan Kegiatan yang terselenggara dan terjabar pada DPA-SKPD Kecamatan Praya Timur adalah

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran :

- Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
- Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
- Penyediaan jasa Administrasi keuangan
- Penyediaan Alat Tulis kantor
- Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
- Penyediaan makanan dan minuman
- Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

- Pengadaan Kendaraan dinas/operasional
- Pemeliharaan rutin/berkala Kendaraan dinas/operasional

Program Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

- Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

Program Peningkatan dan Pengembangan Pembangunan Kecamatan

- Pengembangan kapasitas wilayah kecamatan
- Penyelenggaraan Administrasi Kesejahteraan Rakyat Kecamatan
- Penyelenggaraan Administrasi Pelayan Umum
- Pemberdayaan Masyarakat Wilayah Kecamatan
- Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kecamatan

BAB IV

Rumusan Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2022 dan Prakiraan Maju Tahun 2023 Kabupaten Lombok Tengah

OPD : KANTOR CAMAT PRAYA TIMUR

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2022			Catatan Penting	Perkiraan Maju Tahun 2023	
			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN							
	PERENCANAAN							
.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Prosentase dokumen laporan kinerja , keuangan dan Sarana Prasarana dilaksanakan tepat waktu	100%	2.862.900.346,00	DAU			
1	2.01	Perencanaan, penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		9.794.111,00	DAU			
1	2.01	1 Penyusunan dokumen perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen perencanaan (Renstra Renja,RKA)	4 dokumen	5.668.523,00	DAU		
1	2.01	6 Koordinasi dan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja	Laporan capaian kinerja(Laopran kinerja bulanan,LKJIP,LKPD,LPPD)	15 dokumen	4.125.588,00	DAU		
1	2.02	Administrasi keuangan perangkat daerah		2.084.882.914,00	DAU			
1	2.02	1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Gaji dan Tunjangan ASN	20 dokumen	2.076.675.498,00	DAU		
1	2.02	5 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan Tahunan SKPD	1 dokumen	3.639.280,00	DAU		
1	2.02	7 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan /Triwulanan/ Semesteran SKPD	Laporan keuangan bulanan SKPD	12 dokumen	4.568.136,00	DAU		
1	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah		176.013.117,00	DAU			

				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Alat-alat elektronik lainnya	1 paket	6.984.174,00	DAU			
				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Komputer/Laptop/server dan perlengkapannya	1 paket	113.291.697,00	DAU			
				Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Alat-alat rumah tangga	1 paket	8.028.800,00	DAU			
				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Notulen rapat	12 bulan	20.440.446,00	DAU			
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan hasil koordinasi dan konsultasi	4 dokumen	27.268.000,00	DAU			
	1	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			353.640.204,00	DAU			
	1	2.07	1	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Roda empat	1 unit	300.000.000,00				
					Roda dua	1 unit	20.000.000,00				
	1	2.07	5	Pengadaan Mebel	Meubelair	1 paket	33.640.204,00	DAU			
	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			20.383.000,00	DAU			
	1	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	12 bulan	1.800.000,00	DAU			
	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Belanja Tagihan Air	12 bulan	4.949.000,00	DAU			
					Belanja Tagihan Listrik	12000 kwh	6.734.000,00	DAU			
					Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	240 megabyte	6.900.000,00	DAU			
	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			218.187.000,00	DAU			
	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	12 bulan	58.437.000,00	DAU			

						Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	13 unit	3.250.000,00	DAU			
						Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	13 unit	6.500.000,00	DAU			
		1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	1 paket	150.000.000,00	DAU			
7	1	2			PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Rata-rata capaian kinerja pemerintahan kecamatan yang dikoordinasikan	100%	109.255.830,00	DAU			
7	1	2	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan			88.271.020,00	DAU			
7	1	2	2.01	1	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Laporan intensifikasi dan Ekstensifikasi PBB	1 dokumen	88.271.020,00	DAU			
						Profil Kecamatan	1 dokumen		DAU			
						Laporan hasil koordinasi pemerintahan umum	1 dokumen		DAU			
7	1	2	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat			20.984.810,00	DAU			
7	1	2	2.04	3	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Laporan penyelenggaraan PATEN/IUMK	1 dokumen	20.984.810,00	DAU			
7	1	3			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Rata-rata capaian kinerja pemberdayaan masyarakat Desa yang dikoordinasikan	100%	15.793.224,00	DAU			
7	1	3	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa			15.793.224,00	DAU			

7	1	3	2.01	1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Laporan hasil musrenbang kecamatan	1 dokumen	15.793.224,00	DAU			
7	1	4			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Rata-rata capaian kinerja Ketentraman dan ketertiban umum yang dikoordinasikan	100%	19.312.000,00	DAU			
7	1	4	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum			19.312.000,00	DAU			
7	1	4	2.01	1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Laporan hasil patroli terpadu kecamatan	1 dokumen	19.312.000,00	DAU			
						Laporan sosialisasi trantib terhadap BKD/BKK Kecamatan			DAU			
7	1	5			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Rata-rata capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	100%	407.811.700,00	DAU			
7	1	5	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah			407.811.700,00	DAU			
7	1	5	2.01	4	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Laporah hasil pelaksanaan Tabliq akbar	1 kali	407.811.700,00	DAU			
						Laporah hasil pelaksanaan MTQ/STQ tingkat Kecamatan	1 kali		DAU			
						Laporan hasil pelaksanaan Lomba UKS tingkat Kecamatan	1 kali		DAU			
						Laporah hasil pelaksanaan evaluasi tingkat perkembangan Posyandu	1 dokumen		DAU			

7	1	6			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Rata-rata capaian kinerja Pembinaan dan pengawan pemerintahan Desa	100%	28.924.652,00	DAU			
7	1	6	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa			28.924.652,00	DAU			
7	1	6	2.01	3	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Laporan hasil evaluasi APBDes	1 dokumen	28.924.652,00	DAU			
						Laporan hasil evaluasi LPPDes	1 dokumen		DAU			
						Laporan hasil evaluasi tingkat perkembangan desa/kelurahan	1 dokumen		DAU			
					JUMLAH			3.443.997.752,00				

CAMAT PRAYA TIMUR,

H.LALU FATHURRAHMAN,SH.
NIP.196712311986021020

BAB V

PENUTUP

1. KESIMPULAN

Dari uraian diatas dapat kami simpulkan bahwa untuk mencapai tujuan organisasi dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik dan tata pemerintahan yang baik (Good Government) perlu didukung dengan kemampuan dana / anggaran yang memadai, Sumber Daya Manusia, Peralatan serta sumber pendukung lainnya yang memadai .

Disamping itu penetapan prioritas pembangunan yang meliputi berbagai aspek sangat urgen untuk dilakukan. Prioritas itu meliputi hal-hal sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas sarana dan infrastruktur penunjang perekonomian masyarakat seperti : jalan, jembatan, perbaikan pasar,terminal dan lain-lain.
2. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat di semua bidang pokok yang menjadi mata pencaharian utama masyarakat.
3. Meningkatkan kualitas aparatur melalui pelaksanaan pendidikan dan pelatihan untuk mensukseskan setiap program pemerintah, yang diikuti dengan upaya peningkatan sarana dan prasarana penunjang.
4. Terus mengupayakan peningkatan derajat kesehatan masyarakat melalui peningkatan jumlah sarana dan prasarana kesehatan yang telah ada dan mendorong masyarakat untuk membiasakan diri dengan budaya hidup sehat.
5. Menjaga dan mempertahankan kondisi keamanan yang semakin kondusif, dengan meningkatkan kerjasama antara aparat keamanan dengan masyarakat.

2. SARAN-SARAN

1. Pemerintah atasan hendaknya terus melakukan analisa dan kajian-kajian di bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat, stabilitas daerah dan peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur wilayah.
2. Meningkatkan anggaran SKPD Kecamatan sebagai unsur pemerintahan yang berhubungan langsung dengan masyarakat dalam hal pelayanan dan pembinaan kemasyarakatan.

Mujur, Juli 2021

KECAMAT PRAYA TIMUR,



FATHURRAHMAN,SH.

NIP. : 196712311986021020